

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

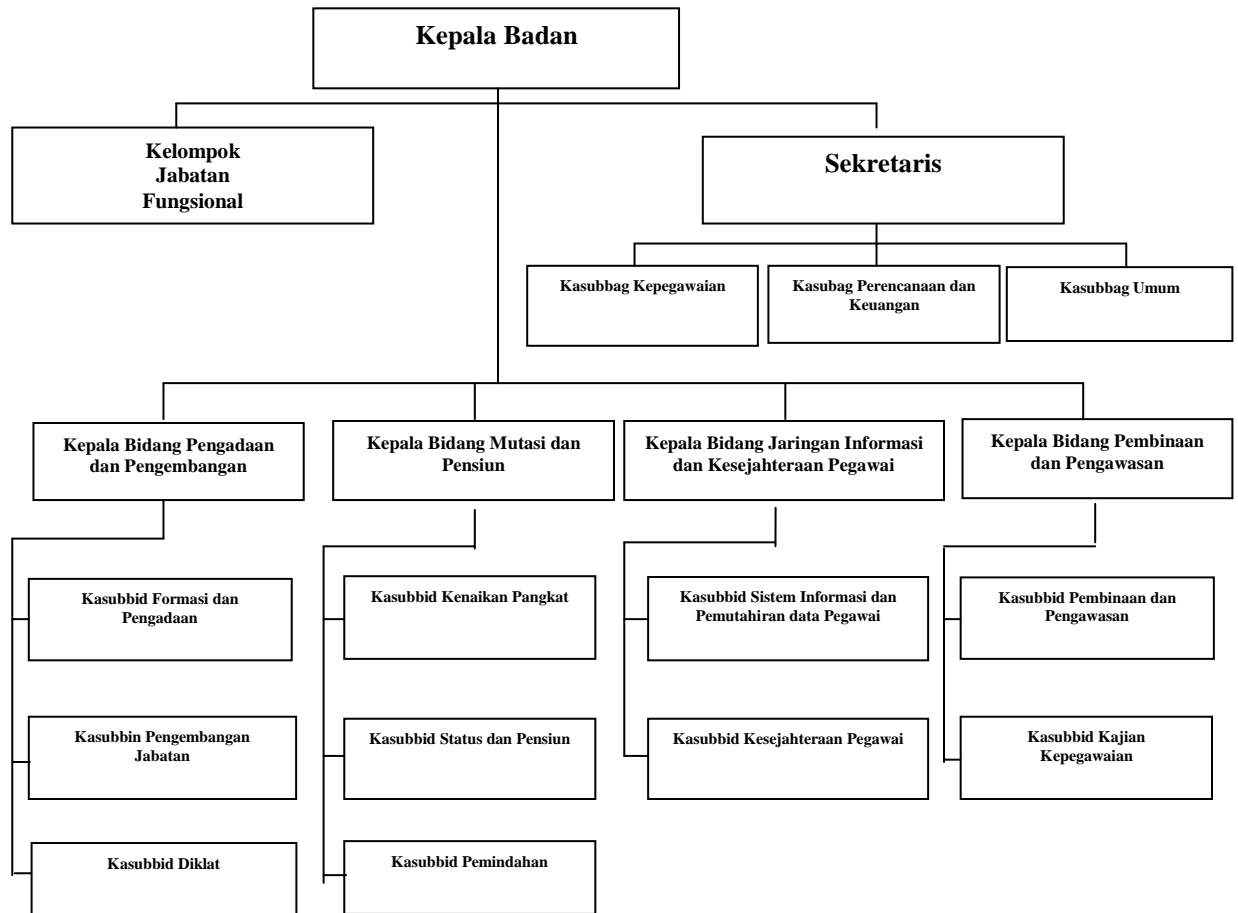
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pengadaan, pengembangan, mutasi, pensiun, jaringan informasi, kesejahteraan, pembinaan dan pengawasan pegawai;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka susunan organisasi BKD Prov. Sulut adalah sebagai berikut:



Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris

- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Mutasi dan Pensiun membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kenaikan Pangkat;
 - 2. Sub Bidang Status dan Pensiun;
 - 3. Sub Bidang Pemindahan.
- d. Bidang Pengadaan dan Pengembangan membawahi;
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan;
 - 3. Sub Bidang Diklat.
- e. Bidang Jaringan Informasi dan Kesejahteraan Pegawai membawahi;
 - 1. Sub Bidang Sistim Informasi dan Pemutahiran Data Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan membawahi;
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kajian Kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berikut sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

a. Berdasarkan Golongan/ Ruang

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Golongan IV	4	2	6	
Golongan III	25	21	43	
Golongan II	5	2	7	
Golongan I	-	-	-	

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Setingkat Doktor (Strata III)	-	-	-	
Setingkat Magister (Strata II)	6	2	8	
Setingkat Sarjana (Strata I)	16	20	36	
Setingkat Diploma (DIII)	3	-	3	
Setingkat SMA	7	2	9	
Setingkat SMP	-	-	-	
Setingkat SD	-	-	-	

c. Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Eselon I	-	-	-	
Eselon II	1	-	1	
Eselon III	3	2	5	
Eselon IV	9	2	11	
Staf	17	22	39	

d. Berdasarkan Diklat Struktural

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
DIKLAT LEMHANAS	-	-	-	
DIKLAT PIM I	-	-	-	
DIKLAT PIM II	2	-	2	
DIKLAT PIM III	4	2	6	
DIKLAT PIM IV	7	3	10	
DIKLAT Pra Jabatan	19	19	38	

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BKD Provinsi Sulawesi Utara mendapat dukungan sarana Mobilitas sebanyak 1 (satu) buah kendaraan roda 4 dan sebanyak 5 (lima) buah kendaraan roda 2 (dua), 34 unit

Komputer, 8 unit Laptop, 22 unit printer, 1 unit LCD, 1 Buah Camera digital serta prasarana kantor lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Utara secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, Sistem Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana terlihat pada lampiran I.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dalam pengembangan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara muncul sejumlah tantangan seperti tersebut di bawah ini :

- a. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel
- b. Adanya ego sektoral SKPD di kabupaten/kota
- c. Adanya intervensi politik dalam birokrasi terutama di kab/kota
- d. Adanya multi interpretasi terhadap aturan-aturan kepegawaian dalam penerapannya

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yakni :

- Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan
- Adanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri

- Tersedianya jaringan kepegawaian dengan BKN
- Adanya pembagian tugas tiap PNS yang jelas